



Analisis Hubungan Upah Minimum Regional dan IPM terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mandailing Natal

Nursalamah

Fakultas Ekonomi, Universitas Graha Nusantara

*Corresponding Author's e-mail: nursalamah_ie@yahoo.co.id

Article History:

Received: October 15, 2025

Revised: October 28, 2025

Accepted: October 31, 2025

Keywords:

Upah Minimum Regional,
Indeks Pembangunan
Manusia, Partisipasi
Angkatan Kerja

Abstract: This study aims to analyze the influence of the Regional Minimum Wage (RMW) and the Human Development Index (HDI) on the Labor Force Participation Rate (LFPR) in Mandailing Natal Regency. The research is motivated by employment issues, where increases in RMW and improvements in HDI do not necessarily correspond with a higher labor force participation rate. A quantitative research approach was employed using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) for the 2018–2022 period. The analytical method used is multiple linear regression, supported by a series of classical assumption tests, including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests, to ensure model validity and reliability. The results indicate that: (1) the Regional Minimum Wage (RMW) has a significant negative effect on the Labor Force Participation Rate (LFPR); (2) the Human Development Index (HDI) has no significant effect on LFPR; and (3) RMW and HDI simultaneously have a significant influence on LFPR, with a combined contribution of 81.8%. These findings suggest that the RMW is a more dominant factor in determining labor force participation compared to HDI. The study concludes that wage adjustments should be balanced with the labor market's absorption capacity. Furthermore, improvements in human resource quality must be accompanied by efforts to expand employment opportunities to ensure sustainable labor participation and inclusive economic growth.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Nursalamah, N. (2025). Analisis Hubungan Upah Minimum Regional dan IPM terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mandailing Natal. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2879–2891. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4676>

PENDAHULUAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator utama yang menggambarkan sejauh mana penduduk usia produktif terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Nilai TPAK yang tinggi mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat serta tersedianya peluang kerja yang memadai bagi masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, Upah Minimum Regional (UMR) dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi TPAK, karena berfungsi sebagai kebijakan untuk melindungi kesejahteraan tenaga kerja dan menciptakan keadilan dalam sistem pengupahan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memiliki peran signifikan karena mencerminkan kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pasar tenaga kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan hingga kini masih menjadi isu penting dalam perekonomian. Tingginya penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah diyakini mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pembangunan ekonomi sendiri dipahami sebagai proses peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang (Saputra dkk, 2019). Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi terbagi ke dalam lingkup nasional dan daerah, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas kesempatan kerja (Setiawan, 2019). Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya manusia (SDM). Bertambahnya jumlah penduduk usia produktif akan meningkatkan jumlah tenaga kerja, yang pada gilirannya perlu diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja memegang peranan penting dalam mengatur serta menggerakkan perekonomian, sehingga pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kontribusi manusia sebagai faktor input utama (Aini dkk, 2022).

Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pencari kerja maupun yang telah bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak hanya mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja, tetapi juga berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi dan kondisi sosial-ekonomi suatu daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan rasio penduduk usia kerja (≥ 15 tahun) yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik bekerja, mencari pekerjaan, maupun mempersiapkan usaha (Hafiz dkk, 2021). Untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing, perlu dilakukan perbaikan pada sektor pendidikan, misalnya melalui penerapan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan juga penting agar masyarakat tidak hanya berorientasi menjadi pekerja, melainkan juga mampu menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha (Yusuf dkk, 2019).

Di Indonesia, faktor-faktor yang sering dikaji sebagai penentu TPAK meliputi upah Minimum Regional/UMR atau Upah Minimum Kabupaten/Kota), tingkat pendidikan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merepresentasikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Seiring perubahan kebijakan upah dan target pembangunan manusia, pemahaman tentang bagaimana UMR dan IPM memengaruhi partisipasi angkatan kerja di tingkat kabupaten menjadi penting untuk merancang intervensi yang efektif (ILO, 2019). Secara teoretis, kenaikan upah minimum dapat menjadi insentif bagi penduduk usia kerja untuk memasuki pasar kerja, karena adanya jaminan pendapatan yang lebih baik. Namun, dalam kondisi tertentu, kebijakan upah minimum justru dapat menekan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor usaha kecil dan informal, akibat meningkatnya biaya tenaga kerja. Isu ini menjadi relevan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal, yang perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian dan sektor informal. penetapan UMR/UMK sering kali menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, upah minimum melindungi pekerja dari eksploitasi, tetapi di sisi lain, dapat meningkatkan beban biaya produksi yang berpotensi menurunkan minat perusahaan dalam merekrut tenaga kerja baru.

Selain faktor upah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memiliki peran penting dalam mendorong TPAK. IPM mencakup tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih siap dan mampu memasuki pasar tenaga kerja. Akan tetapi, tingginya IPM tidak selalu menjamin tingginya partisipasi kerja jika tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Rendahnya kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan akan membatasi

produktivitas angkatan kerja. Jika IPM rendah, maka meskipun lapangan kerja tersedia, tidak semua penduduk usia kerja dapat berpartisipasi secara efektif.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menelaah hubungan antara Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), namun hasilnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wibowo (2020) menemukan bahwa peningkatan upah minimum dapat mendorong partisipasi tenaga kerja karena memberikan insentif ekonomi yang lebih menarik, terutama di sektor formal. Hasil serupa dikemukakan oleh Kuncoro (2019) yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum mampu meningkatkan motivasi individu usia produktif untuk bekerja. Namun, temuan yang berbeda disampaikan oleh Hidayat dan Nurmala (2021) yang menemukan bahwa kenaikan upah minimum justru berdampak negatif terhadap TPAK karena menurunkan kemampuan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja, terutama pada sektor padat karya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap partisipasi kerja sangat bergantung pada struktur ekonomi daerah dan kapasitas penyerapan tenaga kerja.

Adapun penelitian yang berfokus pada pengaruh IPM terhadap TPAK juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Putri dan Santosa (2020) menjelaskan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap partisipasi kerja, karena peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sebaliknya, Rahmawati dan Setyawan (2022) menemukan bahwa kenaikan IPM tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan TPAK, terutama di wilayah dengan keterbatasan lapangan kerja formal.

Dalam konteks Kabupaten Mandailing Natal, tantangan pembangunan manusia dan pasar tenaga kerja masih cukup kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM kabupaten ini masih berada di bawah rata-rata provinsi, sementara sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja utama menghadapi persoalan produktivitas dan daya saing. Di sisi lain, kebijakan UMK yang ditetapkan tiap tahun diharapkan mampu memberikan perlindungan pendapatan bagi pekerja, namun perlu dievaluasi apakah benar-benar mampu mendorong partisipasi angkatan kerja secara signifikan. Daerah ini menunjukkan fenomena unik di mana peningkatan UMR dan IPM dalam beberapa tahun terakhir tidak selalu diikuti oleh peningkatan partisipasi tenaga kerja, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris baru dalam memahami dinamika ketenagakerjaan di tingkat daerah.

Kabupaten Mandailing Natal sebagai wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi lokal tersendiri, kombinasi sektor pertanian, pertambangan kecil, dan jasa layak dikaji secara khusus karena respons TPAK terhadap perubahan UMR dan IPM dapat berbeda dibanding tingkat provinsi atau nasional. Studi kontekstual tingkat kabupaten membantu mengungkap kondisi nyata penyerapan tenaga kerja dan implikasi kebijakan upah minimum serta program pembangunan manusia yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Beberapa penelitian daerah menunjukkan bahwa hubungan antara upah minimum, IPM, dan TPAK dapat bersifat heterogen: pada sebagian wilayah UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, sementara pada wilayah lain pengaruhnya lemah atau tidak signifikan kemungkinan karena struktur industri, besaran sektor informal, dan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (Awary, 2024). Kabupaten Mandailing Natal memiliki struktur ekonomi yang masih bergantung pada pertanian dan sektor informal. Hal ini memengaruhi fleksibilitas penyerapan tenaga kerja serta respons terhadap kebijakan upah minimum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Mandailing Natal, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan kebijakan upah minimum dan pembangunan manusia dengan dinamika pasar tenaga kerja di tingkat kabupaten. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai ekonomi tenaga kerja serta memperluas pemahaman tentang peran UMR dan IPM dalam memengaruhi TPAK. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan manusia, menjadi referensi bagi akademisi maupun peneliti lain, serta memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya kebijakan upah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong partisipasi angkatan kerja.

LANDASAN TEORI

Partisipasi angkatan kerja adalah persentase penduduk usia kerja (≥ 15 tahun) yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari kerja. Partisipasi kerja dipengaruhi oleh keseimbangan antara income effect dan substitution effect. Peningkatan upah mendorong lebih banyak individu masuk pasar kerja karena imbalan kerja lebih tinggi (*substitution effect*), namun juga dapat menurunkan partisipasi jika kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan jam kerja lebih sedikit (*income effect*) (Borjas, 2020).

Teori keputusan penawaran kerja (*labour supply*) dan efek upah menyatakan secara tradisional dalam teori ekonomi tenaga kerja, keputusan individu untuk memasuki angkatan kerja dipengaruhi oleh *trade-off* antara insentif finansial (upah), biaya alternatif misalnya, waktu luang, tanggungan domestik, serta kondisi sosial-kultural. Kenaikan upah minimum dapat memicu efek substitution diganti aktivitas non-pekerjaan menjadi bekerja, tetapi juga bisa memicu efek income dimana orang memilih bekerja lebih sedikit jika kebutuhan ekonominya telah terpenuhi. Variabel makro dan struktural yang mempengaruhi TPAK. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya upah dan IPM, tetapi variabel seperti pengangguran, inflasi, infrastruktur pendidikan, standar hidup layak, distribusi kesempatan kerja, dan kondisi ekonomi lokal memoderasi pengaruh. Misalnya, dalam studi ASEAN-6, kendati upah minimum tidak signifikan, pengangguran dan inflasi memiliki pengaruh nyata (Card dan Krueger, 1995).

Upah minimum merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah dan menjaga daya beli masyarakat. Teori pasar tenaga kerja neoklasik menjelaskan bahwa upah ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika upah minimum ditetapkan lebih tinggi dari tingkat keseimbangan pasar, dapat terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja atau pengangguran. Namun, teori ekonomi kelembagaan menekankan bahwa upah minimum juga dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong konsumsi masyarakat (UNDP, 2024). Dalam konteks Indonesia, UMR/UMK ditetapkan berdasarkan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Beberapa penelitian menemukan bahwa kenaikan upah minimum dapat mendorong lebih banyak penduduk usia kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja, tetapi juga menekan rekrutmen di sektor usaha kecil (Becker, 1993).

upah minimum dapat berfungsi sebagai tolok ukur (*benchmark*) bagi individu dalam menetapkan reservation wage-nya (harga minimal yang mereka anggap layak untuk

bekerja). Jika minimum wage dinaikkan, reservation wage yang diharapkan juga cenderung meningkat, yang dapat mendorong lebih banyak orang untuk mencari pekerjaan (masuk angkatan kerja), atau sebaliknya jika mereka menetapkan reservation wage di atas yang tersedia (Sousounis dan Lanot, 2022). Studi panel di ASEAN-6: *Impact of Wages, Unemployment Rates, and Inflation on Labor Force Participation* menguji dampak upah minimum, tingkat pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di enam negara ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa upah minimum dalam kasus tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi partisipasi angkatan kerja, sementara pengangguran dan inflasi memiliki pengaruh (Ramadhani & Karjati, 2025). Ini menunjukkan bahwa efek upah minimum terhadap partisipasi tenaga kerja bisa sangat kontekstual tergantung pada kondisi makroekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Menurut konsep pembangunan manusia dari UNDP, peningkatan IPM menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Teori human capital menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta peluang seseorang untuk berpartisipasi di pasar kerja. Dengan demikian, IPM yang tinggi di suatu wilayah diharapkan berkorelasi positif dengan TPAK. Tren dan capaian IPM nasional Indonesia: Menurut data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,84% dibandingkan tahun sebelumnya (73,77). Semua dimensi—umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak—meningkat.

Proyeksi dan konvergensi IPM: Studi tentang *Towards Equity Projecting and Converging the Human Development Index in Indonesia* (Wicesa, Setyanti, Prestianawati, 2024) membahas proyeksi perkembangan IPM ke depan dan kesenjangan antar provinsi. Mereka menemukan bahwa salah satu variabel yang signifikan mempengaruhi konvergensi IPM adalah belanja per kapita pada fungsi pendidikan (Wicesa et al., 2024). Variabel-pendukung semacam pendidikan dan kesehatan dianggap krusial dalam meningkatkan IPM yang kemudian akan berpengaruh terhadap kemampuan dan kesiapan tenaga kerja. Anggaran pendidikan dan HDI, penelitian tentang Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Human Development Index (HDI) di Indonesia Periode 2004-2023 (BPS, 2023) menemukan bahwa alokasi anggaran pendidikan memiliki korelasi sangat kuat terhadap HDI, dengan nilai determinasi (R^2) mencapai sekitar 0,943 (Sumarsono, 2020). Ini mendukung teori bahwa investasi dalam pendidikan adalah komponen utama dalam pembangunan manusia.

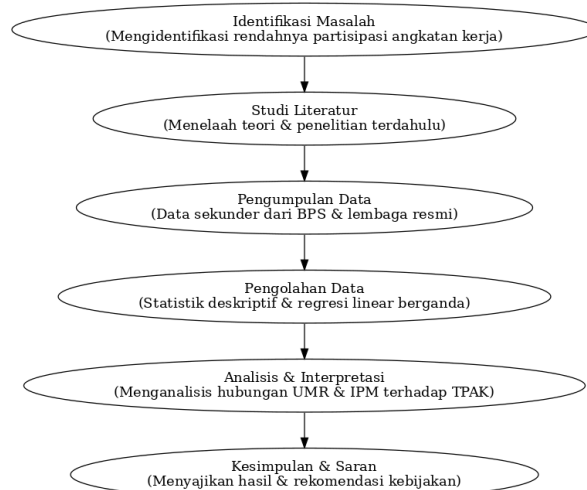
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh variabel bebas (Upah Minimum Regional/UMR dan Indeks Pembangunan Manusia/IPM) terhadap variabel terikat (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK) di Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan kuantitatif memberikan hasil yang objektif karena data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Ketenagakerjaan, sehingga dapat diuji secara statistik. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Sumber data meliputi Statistik Ketenagakerjaan, Statistik Daerah Kabupaten Mandailing Natal, serta publikasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemanfaatan data sekunder ini dipilih karena memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, mengingat BPS merupakan lembaga resmi negara yang secara konsisten menerbitkan data statistik sosial, ekonomi, dan pembangunan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas (*independent variables*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian meliputi upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Mandailing Natal yang dinyatakan dalam rupiah per tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mandailing Natal. Sementara itu, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Mandailing Natal. Variabel ini dipilih karena TPAK merepresentasikan sejauh mana penduduk usia kerja berperan aktif dalam pasar tenaga kerja, baik melalui kegiatan bekerja maupun dalam pencarian kerja.

Tahapan penelitian ini disusun secara sistematis dengan tujuan agar proses penelitian berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang valid. Langkah pertama dimulai dengan identifikasi masalah, yaitu mengkaji fenomena rendahnya partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Mandailing Natal serta keterkaitannya dengan variabel ekonomi dan sosial yang memengaruhinya. Selanjutnya dilakukan studi literatur yang berfokus pada teori-teori dasar serta penelitian terdahulu yang relevan mengenai hubungan antara Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tahap ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan kerangka penelitian.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder, khususnya publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya. Data tersebut kemudian melalui proses pengolahan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi umum, serta regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (UMR dan IPM) dengan variabel terikat (TPAK). Hasil pengolahan data kemudian masuk ke tahap analisis dan interpretasi, yaitu menelaah sejauh mana pengaruh UMR dan IPM terhadap TPAK serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan pemberian saran yang merangkum hasil analisis serta memberikan rekomendasi, baik dalam konteks kebijakan pembangunan ketenagakerjaan maupun sebagai masukan untuk penelitian lanjutan. Adapun tahapannya ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, digunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan variabel penelitian, yaitu Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Mandailing Natal selama periode penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai tren dan dinamika masing-masing variabel dari tahun ke tahun. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat dalam analisis regresi. Uji ini meliputi uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk memastikan tidak terdapat hubungan kuat antarvariabel bebas, uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah varians residual bersifat homogen, serta uji autokorelasi untuk menilai ada tidaknya hubungan antara residual pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Hasil uji asumsi klasik yang baik akan menjamin validitas model regresi yang digunakan. Tahap berikutnya adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh UMR dan IPM terhadap TPAK. Regresi ini dipilih karena variabel terikat dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas. Secara matematis, model regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPAK_t = \alpha + \beta_1 UMR_t + \beta_2 IPM_t + \varepsilon_t$$

di mana:

- $TPAK_t$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun ke-t
 α = Konstanta
 $\beta_1 \beta_2$ = koefisien regresi masing-masing variabel bebas
 UMR_t = Upah Minimum Regional pada tahun ke-t
 IPM_t = Indeks Pembangunan Manusia pada tahun ke-t
 ε_t = error term

Analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui hubungan antarvariabel, tetapi juga untuk menghasilkan kesimpulan yang sah melalui uji statistik. Setelah model regresi linear berganda diestimasi, dilakukan beberapa uji lanjutan guna menilai signifikansi dan kelayakan model. Uji t (parsial) untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu Upah Minimum Regional (UMR) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel

bebas berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Uji F (simultan) yang bertujuan menilai apakah UMR dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memang layak dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat.

Selanjutnya, dianalisis koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi TPAK dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model, yakni UMR dan IPM. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antarvariabel, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan masih terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi TPAK. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini menegaskan adanya dugaan bahwa UMR dan IPM berpengaruh terhadap TPAK, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji hubungan kausal tersebut dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Utara. Data terdiri dari Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Rentang waktu penelitian meliputi periode 2018-2022. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan antara data time series dan cross section. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat penggunaan.

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,1. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi. Berdasarkan perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF), variabel UMR dan IPM masing-masing memiliki nilai 1,609, yang jauh lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antarvariabel bebas dalam model regresi ini. Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,182 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, model regresi yang digunakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual dapat dianggap homogen. Nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh adalah 3,268 dan mendekati angka 4. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gejala autokorelasi negatif pada model regresi, sehingga perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil.

Selanjutnya dilakukan uji T dan Uji F seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1. Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26.662	78.337		.340	.766
X1	-1.857E-5	.000	-1.093	2.856	.104
X2	1.359	1.307	.398	1.040	.408

a. Dependent Variable: Y

Tabel 2. Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.807	2	12.903	4.491	.182 ^b
	Residual	5.746	2	2.873		
	Total	31.553	4			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel UMR berpengaruh signifikan terhadap TPAK, dengan nilai thitung sebesar 2,856 lebih besar dari ttabel sebesar 2,571, serta memiliki arah koefisien negatif sebesar -1,857. Hal ini berarti setiap kenaikan UMR cenderung menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sementara itu, variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK karena thitung sebesar 1,040 lebih kecil daripada ttabel sebesar 2,571. Dengan demikian, IPM tidak secara langsung memengaruhi variasi TPAK secara parsial. Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 4,491 lebih besar dibandingkan Ftabel sebesar 2,571 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel UMR dan IPM bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap TPAK.

Tahap terakhir yaitu dilakukan analisis regresi berganda dengan hasil ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------	-------------------------

		B	Std. Error	Beta			Tolera nce	VIF
1	(Const ant)	26.662	78.337		.340	.766		
	X1	-1.857E- 5	.000	-1.093	-2.856	.104	.622	1.609
	X2	1.359	1.307	.398	1.040	.408	.622	1.609

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil regresi diperoleh:

$$TPAK_t = 26,67 - 1,86UMR_t + 1,36 IPM_t + \varepsilon_t$$

Interpretasi hasil regresi adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 26,662 menunjukkan bahwa apabila UMR dan IPM dalam kondisi konstan, maka TPAK berada pada nilai 26,662.
2. Koefisien regresi UMR sebesar -1,857 berarti setiap kenaikan UMR sebesar 1% akan menurunkan TPAK sebesar 1,857%.
3. Koefisien regresi IPM sebesar 1,359 menunjukkan bahwa setiap kenaikan IPM sebesar 1% akan meningkatkan TPAK sebesar 1,359%.

Upah merupakan faktor utama dalam menentukan kesejahteraan pekerja. Dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa UMR berpengaruh signifikan terhadap TPAK dengan arah negatif. Artinya, kenaikan UMR justru menurunkan TPAK di Kabupaten Mandailing Natal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pradanasari (2018) yang menemukan bahwa kenaikan UMR berdampak negatif terhadap TPAK di Jawa Timur. Kenaikan upah minimum cenderung meningkatkan biaya produksi, yang mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja, bahkan menggantikan tenaga kerja dengan mesin (Smith & Johnson, 2022). Dengan demikian, meskipun kenaikan UMR bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dampak lain yang muncul adalah berkurangnya penyerapan tenaga kerja, yang berimplikasi pada menurunnya TPAK.

Hasil uji t menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Hal ini berarti meskipun IPM Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan, tidak serta merta berdampak pada partisipasi angkatan kerja. Hasil ini dapat dijelaskan melalui teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP (2008), di mana peningkatan IPM lebih menekankan pada aspek kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan, yang dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. Selain itu, menurut Kodrat (Kodrat, 2007), faktor usia, jenis kelamin, dan peluang kerja juga sangat menentukan partisipasi tenaga kerja. Misalnya, banyak penduduk usia produktif masih melanjutkan pendidikan atau perempuan lebih memilih mengurus rumah tangga, sehingga meskipun IPM meningkat, hal tersebut tidak serta-merta meningkatkan TPAK. Hasil penelitian ini konsisten dengan pendapat Setyowati (Setyowati, 2021), bahwa TPAK dapat meningkat jika peluang kerja tersedia luas. Sebaliknya, ketika sebagian besar penduduk usia produktif tidak masuk ke pasar kerja (karena sekolah, mengurus rumah tangga, atau alasan lain), maka peningkatan IPM tidak berbanding lurus dengan peningkatan TPAK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, uji statistik, serta pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Mandailing Natal. Artinya, setiap kenaikan UMR justru menurunkan TPAK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UMR dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, kenaikan upah dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja, sehingga mengurangi penyerapan tenaga kerja.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Meskipun IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut belum diikuti dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Peningkatan IPM lebih merefleksikan perbaikan pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang bersifat jangka panjang.
3. UMR dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap TPAK dengan kontribusi sebesar 81,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi TPAK, meskipun secara parsial pengaruhnya berbeda. Faktor-faktor lain di luar penelitian, seperti kondisi ekonomi daerah, struktur industri, dan preferensi tenaga kerja, turut memengaruhi TPAK.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan UMR, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja namun juga menjaga kemampuan perusahaan agar tidak menurunkan serapan tenaga kerja. Selain itu, peningkatan IPM perlu diimbangi dengan perluasan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan agar kualitas sumber daya manusia benar-benar berdampak pada peningkatan partisipasi angkatan kerja. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk usia produktif, serta pertumbuhan ekonomi, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, N., Haryanto, T., & Fadli, M. (2022). Peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 145-156.
- Awary, N. (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. *Jurnal Bisnis & Net, Dharmawangsa*. 7(20), 621-633.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023, November 15). *Indonesia's Human Development Index in 2023 reached 74.39, an increase of 0.62 points (0.84 percent) compared to previous year* [Press release].
- Baskara, A., & Dahlan, D. (2024). Pengaruh anggaran pendidikan terhadap Human Development Index (HDI) di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2023. *PEKA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 39-53.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Borjas, G.J. (2020). *Labor Economics*, 8th ed. New York: McGraw-Hill Education.

- Card, D., & Krueger, A. B. (1995). *Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hafiz, A., Ramadhan, F., & Putri, S. (2021). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 101-112.
- Hidayat, R., & Nurmala, D. (2021). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri padat karya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145-157.
- Kodrat, D. (2007). *Ekonomi Tenaga Kerja*. Bandung: Alfabeta.
- Setyowati, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 145-158.
- Kuncoro, M. (2019). Analisis kebijakan upah minimum dan dampaknya terhadap partisipasi tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 35-48.
- International Labour Organization (ILO). (2019). *Indonesia Labour Market Profile 2025*. Geneva: ILO.
- Pradanasari, N. (2018). *Analisis pengaruh upah minimum dan pendidikan terhadap partisipasi angkatan kerja di Indonesia* Skripsi, Universitas Indonesia.
- Putri, A. D., & Santosa, B. (2020). Dampak indeks pembangunan manusia terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Pembangunan*, 8(3), 211-223.
- Rahmawati, E., & Setyawan, A. (2022). Hubungan antara IPM dan partisipasi angkatan kerja di daerah dengan dominasi sektor informal. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(1), 59-70.
- Ramadhani, N. E., & Karjati, P. D. (2025). Impact of Wages, Unemployment Rates, and Inflation on Labor Force Participation Rate in ASEAN-6. *Independent: Journal of Economics*, 5(2), 13-19.
- Saputra, A., Pratama, Y., & Lestari, D. (2019). Analisis pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55-68.
- Sari, N. P., & Wibowo, R. (2020). Pengaruh upah minimum terhadap partisipasi angkatan kerja di provinsi-provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 5(2), 102-114.
- Setiawan, R. (2019). Pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja: perspektif daerah dan nasional. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(1), 23-34.
- Smith, J. T., & Johnson, R. A. (2022). Minimum wage effects on reservation wages. *Journal of Labor Research*, 43(4), 415-439.
- Sousounis, P., & Lanot, G. (2022). Minimum Wage Effects on Reservation Wages. *Journal of Labor Research*, 43(3), 415-439.
- Sumarsono, A. (2020). Dampak kenaikan upah minimum terhadap efisiensi tenaga kerja dan substitusi tenaga kerja dengan mesin. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 101-115.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2008). *Human Development Report 2008: Fighting Climate Change-Human Solidarity in a Divided World*. New York, NY: United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2024). *Human Development Report 2023/24*. New York: UNDP.
- Wicesa, N. A., Setyanti, A. M., & Prestianawati, S. A. (2024). Towards Equity: Projecting and Converging the Human Development Index in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 17(1).

Yusuf, M., Hidayat, A., & Lestari, N. (2019). Pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 8(1), 45-56.